

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624250

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pn-srp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021. Dengan berakhirnya tahun 2021 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan ditahun 2021. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Negeri Semarang menyusun Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Semarang.

Laporan Tahunan Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan, Laporan Tahunan ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan di wilayah Kabupaten Semarang.



Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan karyawan karyawan Pengadilan Negeri Semarang yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Negeri Semarang berikutnya.



Semarang, 12 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Semarang


Putu Endru Sonata, SH., M.H.
NIP 197704162000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KEBIJAKAN UMUM	1
B. VISI DAN MISI	5
C. MOTTO	5
BAB II PENYELESAIAN PERKARA	6
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	7
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	7
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	7
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	8
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	8
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	9
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	9
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	9
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI AKREDITASI PENGADILAN).....	10
1. Posbakum	12
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	13
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	14
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	15
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	15
B. MUTASI.....	18
C. PROMOSI	19
D. PENSIUN	19
E. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT).....	19



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI .	24
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	24
1. Program Dukungan Manajemen	24
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	26
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
4. Realisasi Anggaran.....	27
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	28
1. Sarana dan Prasarana.....	28
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	34
1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.....	34
2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.....	36
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	37
A. AKREDITASI MENJAMINAN MUTU	37
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	39
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	40
1. Semarang Smart Service “S3”	41
2. SIPEPI	42
3. ASIKK.....	42
4. Anjungan Layanan Mandiri.....	43
5. Co-Working Space	43
6. Panggilan Sidang.....	43
7. Mesin Antran Ptsp	44
BAB VI PENGAWASAN	45
A. INTERNAL	45
B. EVALUASI.....	46
BAB VII PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. REKOMENDASI	49



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum.....	6
Tabel 2.2 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021	6
Tabel 2.3 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021	7
Tabel 2.4 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021	7
Tabel 2.5 Matriks Keadaan Perkara pada wilayah Hukum Pengadilan	8
Tabel 2.6 Perkara yang di putus tepat Waktu.....	8
Tabel 2.7 Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	9
Tabel 2.8 Perkara Yang Berhasil di Mediasi	9
Tabel 2.9 Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	9
Tabel 2.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum.....	13
Tabel 2.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling	14
Tabel 2.12Jumlah Perkara yang dilakukan di Luar Gedung Pengadilan.....	14
Tabel 13 Daftar Hakim Pengawas Bidang.....	45



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Negeri Semarang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI dibawah Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dan juga harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu

2021, Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut selain berupa regulasi juga diutamakan dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Semarang dan

satuan kerja dibawahnya, antara lain sebagai berikut :

- ✚ Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Pedoman Standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018.
- ✚ Penerapan aplikasi *E-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara

secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *E-Court* pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018.

- ✚ Aplikasi Eraterang, sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERATERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online.

ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara

Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

✚ Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellence*). Tahun 2017, Pengadilan Negeri Semarang dan telah diakreditasi. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

✚ Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berfokus pada kompetensi, Mahkamah

Agung telah meluncurkan aplikasi Sikep versi 3.1.0, yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan pengadilan tentang peta Sumber Daya Manusia di satuan kerja hingga dapat membantu penambihan keputusan. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) untuk pertukaran data diklat pengawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai.

✚ Pengembangan aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas) versi 3.0 yang memuat berbagai perbaikan dan penambahan menu grafikasi dan menu benturan antar kepentingan. MA juga membangun E-Monitoring pengawasan, aplikasi yang digunakan untuk memonitoring hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pengadilan

tingkat pertama. Aplikasi ini untuk keseragaman instrument pengawasan membantu tugas hakim pengawas.

✚ Kebijakan Mahkamah Agung dalam hal peningkatan kepercayaan publik dalam pengelolaan perkara, yang dilakukan dengan menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menata kembali mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan yang bukan Penerimaan Semarapura Bukan Pajak (non-PNBP). Agar proses pelaksanaan peradilan pidana juga lebih terbuka dan akutanbel.

✚ Mahkamah Agung telah menyusun prosedur baru penyampaian relaas panggilan atau pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri. MA dan Kementerian Luar

Negeri telah memperbarui Nota Kesepahaman terkait penanganan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan dari pengadilan luar negeri ke pengadilan di Indonesia. Selain Nota Kesepahaman, telah ditandatangani pula 3 perjanjian kerjasama dan satu Surat Keputusan Bersama pada tanggal 10 September 2018 antara MA dan Kementerian Luar Negeri. Maka, mulai 12 September 2018 seluruh pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati.

B. VISI DAN MISI

Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

Visi Pengadilan Negeri Semarapuraselaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Semarang

adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Semarang mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

C. MOTTO

Pengadilan Negeri Semarang didalam menjalankan tupoksinya juga memiliki motto **“Lakukan Yang Seharusnya Bukan Yang Biasanya**

BAB II

PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Semarang tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021

No	Satker	Perkara		Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2020	Perkara MAsuk 2021	Perkara Putus 2021	Sisa Perkara 2021	Rasio Penanganan Perkara	
1.	PN Semarang	Pidana	Pidana Biasa	1	87	80	8		
			Pidana Cepat	0	9	9	0		
			Pidana Anak	0	2	2	0		
			Pidana Lalu Lintas	0	4295	4295	0		
		Perdata	Perdata Gugatan	11	128	123	16		
			Perdata Permohonan	0	104	100	4		
			Perdata Gugatan Sederhana	0	7	7	0		
			Eksekusi	5	4	3	6		

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021 sebanyak 11 perkara, 9 Perkara Perdata dan 7 Perkara Pidana, dimana terdapat 9 Perkara Perdata Gugatan Tahun 2020 dan tahun 2021 telah di putus pada tahun 2021, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

No	Satker	Perkara		Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Sisa Perkara 2021	Rasio Penanganan Perkara
1.	PN Semarang	Pidana	Pidana Banding	0	13	13	0	
		Perdata	Perdata Banding	5	4	9	0	

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 sebanyak 3 perkara, 7 Perkara Perdata dan tidak ada perkara Pidana yang mengajukan kasasi pada tahun 2021, dimana pada tahun 2020 masih ada sisa perkara kasasi yang belum putus di tahun 2021 sebanyak 5 perkara sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021
Semua Perkara yang diajukan Kasasi masih dalam proses di Tingkat Kasasi

No	Satker	Perkara		Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Sisa Perkara 2021	Rasio Penanganan Perkara
1.	PN Semarang	Pidana	Pidana Kasasi	1	1	1	1	
		Perdata	Perdata Kasasi	1	6	2	5	

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2021, terdapat 1 Perkara Perdata Gugatan tahun 2021 dan 1 Perkara gugatan 2020 yang belum putus di tahun 2020 yang mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Tabel 2.4 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2021

No	Satker	Perkara		Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Sisa Perkara 2021	Rasio Penanganan Perkara
1.	PN Semarang	Pidana	Pidana PK	0	0	0	0	
		Perdata	Perdata PK	1	2	1	2	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Jumlah perkara di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Data keadaan perkara selama Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Semarang, dimana terdapat 13 Perkara 2020 yang diputus pada tahun 2021, dapat terlihat pada uraian matriks berikut :

Tabel 2.5 Matriks Keadaan Perkara pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021.

No	Nama	Jumlah Sisa Perkara Yang Putus	Keterangan
I.	Pengadilan Negeri Semarang		
1.	Pidana Biasa	1	
2.	Pidana Cepat	0	
3.	Pidana Anak	0	
4.	Pidana Lalu Lintas	0	
5.	Perdata Gugatan	11	
6.	Perdata Permohonan	0	
7.	Perdata Sederhana	0	

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 2.6 Perkara yang di putus tepat Waktu

No	Nama	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Keterangan
I.	Pengadilan Negeri Semarang		
1.	Pidana Biasa dan khusus	72	
2.	Pidana Cepat	2	
3.	Pidana Lalu Lintas	1192	
4.	Perdata Gugatan	123	-
5.	Perdata Permohonan	100	-

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

Tabel 2.7 Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum

No	Nama	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
I.	Pengadilan Negeri Semarang	Pidana Biasa	67	66	66	
		Pidana Cepat	9	9	9	
		Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Anak	2	2	2	
		Perdata Gugatan	119	120	123	
		Perdata Permohonan	100	100	100	

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Pada Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 3 perkara yang berhasil di mediasi

Tabel 2.8 Perkara Yang Berhasil di Mediasi

No	Nama	Perkara	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	Keterangan
I.	Pengadilan Negeri Semarang			
		1.	Perdata	3

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Pada Tahun 2021 jumlah perkara anak yang berhasil dilakukan melalui Diversi sebanyak 1 Perkara

Tabel 2.9 Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Nama	Perkara	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	Keterangan
VII.	Pengadilan Negeri Semarang			
		1.	Pidana Anak	1

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI AKREDITASI PENGADILAN)

Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Semarang terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam



sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Semarang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Semarang sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2018 mendapatkan nilai A Excellent sesuai dengan Sertifikat akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor: TAPM.092/QMR/SERTIFIKAT/7/2018

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan Desk Evaluation dari KEMENPAN RB untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Semarang, Namun Pengadilan negeri Semarang belum berhasil lolos sebagai satker penerima predikat WBK

1. Posbakum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri Semarang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, DIPA 03/Satker (099859) Pengadilan Negeri Semarang, pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melakukan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum melalui pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum yang dilaksanakan oleh Advokat / Pengacara Piket setiap hari kerja : Senin – Jum'at jam 09.00 – 11.00 wita di Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Semarang.

Pos Pelayanan Hukum dimaksud bertujuan untuk memberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Adapun alokasi anggaran Posbakum dan realisasinya sesuai dengan Tabel :

Tabel 2.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Posbakum	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan sidang keliling di gedung Zetting platz Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Pulau Nusa Penida, Anggaran sidang keliling sebesar Rp.65.000.0000,-, Namun dengan Adanya Pandemi Covid 19 pelaksanaan hanya bisa dilaksanakan sampai bulan maret 2021 dan untuk selanjutnya kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan lagi sehingga terjadi Pengembalian Anggaran pada DIPA Dirjen Peradilan Umum sebesar, Rp. 56.900.000,-, yang pada akhirnya alokasi belanja untuk sidang keliling menjadi Rp. 8.100.000 Adapun alokasi anggaran sidang keliling dan realisasinya sesuai dengan Tabel :

Tabel 2.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Sidang di luar gedung Pengadilan	Rp.8.100.000	Rp.8.100.000,-

Adapun rincian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Tabel 2.12 Jumlah Perkara yang dilakukan di Luar Gedung Pengadilan

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dengan tujuan dimana pelayanan akan dilaksanakan di meja pelayanan yang disediakan di lobby Pengadilan Negeri Semarang. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Semarang telah mendapatkan juara II untuk Pengadilan Negeri Kelas II sesuai dengan Piagam Penghargaan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18/PIAGAM PTSP/PN/2018.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Semarang di bagi menjadi berapa layanan antara lain: Pelayanan e-Court, Kasir, Perdata, Hukum, Pidana, Umum dan Helpdesk

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Tuntutan pelayanan publik dewasa ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya dan memiliki integritas tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan baik terhadap sumber daya manusia teknis yudisial maupun sumber daya manusia non teknis yudisial.

Tabel 3.1 Jumlah Sumber Daya manusia

No	Nama	Jabatan	Kepangkatan	Golongan	Keterangan
I	PN Semarang				
1.	PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.	Ketua	Hakim Madya Muda	IV/b	
2.	PULUNG YUSTISIA DEWI, SH.MH.	Hakim	Hakim Pratama Utama	III/d	
3.	ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, SH. M. Hum	Hakim	Hakim Pratama Madya	III/c	
4.	KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H., M.Kn.	Hakim	Hakim Pratama Muda	III/b	
5.	VALERIA FLOSSIE AVILA SANTI, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pratama Muda	III/b	
6.	HANIFA FERI KURNIA, S.H.	Hakim	Hakim Pratama	III/a	
7.	DWI ASRI MUKAROMAH, SH.	Hakim	Hakim Pratama	III/a	
8.	JELIKA PRATIWI, S.H.	Hakim	Hakim Pratama	III/a	



9.	DESAK KETUT METRIANI, SH	Sekretaris	Penata Tk. I	III/d	
10.	I NYOMAN SUDARSANA, SH	Panitera	Penata Tk. I	III/d	
11.	RUPI'AH, S.Sos.	Pan. Mud. Pidana	Penata Tk. I	III/d	
12.	MADE ARI KURNIAWAN, SH	Pan. Mud. Perdata	Penata	III/c	
13.	I WAYAN SESANA SAMIARTA, ST	Kasubag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	
14.	NI KOMANG SERI SUTERISNAWATI, SH	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata Tk. I	III/d	
15.	MADE ARIS BUDIARTHA, S.E.,M.A.P.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk. I	III/d	
16.	ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
17.	I WAYAN DERESTA	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
18.	I NENGAH SUMETRO	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
19.	NI MADE ARI ARTINI, SH	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
20.	KADEK HENDRA SAPUTRA,SE.SH.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
21.	KADEK KRISNA SINTIA DEWI, SH.MH.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
22.	GEDE EKO PRAYUDI,A.Md. SH	Panitera Pengganti	Penata Muda	III/a	
23.	FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
24.	I KOMANG MERTA ARDIASA, S.E.,S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
25.	I GUSTI AGUNG PANJI, SH	Jurusita	Penata Tk. I	III/d	
26.	I NYOMAN SUARTA,SE	Jurusita	Penata	III/c	

27.	I WAYAN TUNAS LESTIANA, SE	Jurusita Pengganti	Penata	III/c	
28.	I KADEK WIDIANTARA. A.Md	Jurusita Pengganti	Penata Muda	III/a	
29.	NI NYOMAN BUDIASIH, S.T., M.T.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda Tk I	III/b	
30.	I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBANG, SH	Analisis Perkara Peradilan Perdata	Penata	III/c	
31.	NI LUH PUTU SUTRIANI, SH	Penyusun laporan Keuangan,	Penata	III/c	
32.	NI MADE DIAH SAWITRI, SE	Bendahara Umum Keuangan	Penata	III/c	
33.	I KETUT SURAWAN	Pengadministrasi Registrasi Perkara Perdata	Pengatur	II/c	
34.	RAHMA SEVIANA PRATAMI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	
35.	YUNITA ANJARDINI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Pengatur	II/c	
36.	I GUSTI NYOMAN ARTHA DANA	Honorer			
37.	I KETUT BUDIASA	Honorer			
38.	I WAYAN SUDIASA	Honorer			
39.	I NENGGAH SETIAWAN	Honorer			
40.	I MADE OKAYANA	Honorer			
41.	I WAYAN KARIANA ANTARA	Honorer			
42.	ADI MURTIYASA	Honorer			
43.	KETUT SURYA DHARMAWAN	Honorer			
44.	PUTU AGUS SUDARSANA	Honorer			

B. MUTASI

Mutasi masuk Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tahun 2021 disajikan dalam tabel

Tabel 3.2 Data Alih Tugas Masuk Hakim Dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang Pada Tahun 2021

NO	NAMA	NIP / GOL RUANG	UnitKerja/ Jabatan	
			Lama	Baru
I	PN Semarang			
1	FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.	198204242009122002/ III.c	Staf PN. Jakarta Barat	Panitera Pengganti PN. Semarang
2	I KOMANG MERTA ARDIASA, S.E., S.H.	198609022009121005/ III.c	Jurusita Pengganti PN. Singaraja	Panitera Pengganti PN. Semarang

Mutasi keluar Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tahun 2021 disajikan dalam tabel

Tabel 3.3 Data Alih Tugas Keluar keluar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2021

NO	NAMA	NIP / GOL RUANG	UnitKerja/ Jabatan	
			Lama	Baru
I	PN Semarang			
1	ARIFKIE, S.H., M.H.	198009272002121002/ III.d	Panitera PN. Semarang	Panitera PN. Situbondo
2	I WAYAN SARJANA, S.H.	196312311994031012/ III.d	Panmud Hukum PN. Semarang	Panitera Pengganti PT. Denpasar
3	NI MADE OKTIMANDIANI,SH	197910152002122003/ IV.a	Wakil Ketua PN. Semarang	Ketua PN. Negara

C. PROMOSI

Pada Tahun 2021 di Pengadilan negeri Semarang tidak terdapat Pegawai yang menjalani Promosi jabatan pada Pengadilan Negeri Semarang baik Hakim maupun pegawai yang terjadi dalam tahun 2021 disajikan dalam Tabel.

Tabel 3.4 Promosi Jabatan Pada Pengadilan Negeri Semarang Dalam Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN	Usul Jabatan
	NIHIL		

D. PENSIUN

Pada Tahun 2021 Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun

Tabel 3.5 Data Pegawai Yang Pensiun dalam Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	NIP / GOL RUANG	TANGGAL PENSIUN
I	PN Semarang			
1	I WAYAN DERESTA	Panitera Pengganti	196112311982031046/III.c	31 Desember 2021

E. DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis maupun non teknis sebanyak 23 pegawai, pada Tahun 2021 beberapa pegawai telah melakukan diklat yang telah diadakan oleh Mahkamah Agung, Badilum dan Instansi Lainnya

Tabel 3.6 Data Pegawai Yang Melaksanakan Diklat Dalam Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1	PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Kepatuhan dan Kelayakan bagi Capim Kelas IB 2. Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial 3. Penyusunan Materi Peningkatan Ideologi Pancasila Bagi Hakim 4. Diklat Perikanan 5. FGD Pedoman Penyusunan Kebijakan MA 6. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	PULUNG YUSTISIA DEWI, SH.MH.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi Barang Bukti Elektronik
	ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI,SH.M.Hum	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Kajian Restorative Justice 2. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H., M.Kn.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation For The TOEFL 2. Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan 3. Presentasi Barang Bukti Elektronik 4. FGD Kajian Restorative Justice 5. FGD Pedoman Penyusunan Kebijakan MA 6. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	VALERIA FLOSSIE AVILA SANTI, S.H., M.H.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. English Effective Writing Batch 3 2. Ilmu Jurnalistik Batch 2 3. Teknik Story Telling 4. Presentasi Barang Bukti Elektronik 5. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	HANIFA FERI KURNIA, S.H.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Kajian Restorative Justice 2. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	DWI ASRI MUKAROMAH, SH.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Kajian Restorative Justice 2. Pembinaan Teknis Secara Virtual 3. Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Pengadilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar
	JELIKA PRATIWI, S.H.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator 2. Pembinaan Teknis Secara Virtual

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
	DESAK KETUT METRIANI, SH	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Kehumasan Pengadilan 2. Pembinaan Ketua PT Denpasar: Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan 3. Jaringan Media dan Kehumasan 4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan 5. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	I NYOMAN SUDARSANA, SH	Panitera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi E-Litigasi dan E-Court Banding 2. Diklat Perikanan 3. Sosialisasi Mekanisme Survei Eksternal ZI 4. Pembinaan Teknis Secara Virtual
	MADE ARI KURNIAWAN, SH	Pan. Mud. Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola Stress di Lembaga Peradilan 2. Bimtek Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi E-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT
	I WAYAN SESANA SAMIARTA, ST	Kasubag Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Langkah-langkah Strategis Penyusunan Anggaran 2021 2. Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon Sekretaris 3. FGD Implementasi SAKTI 4. Sosialisasi Mekanisme Survei Eksternal ZI
	NI KOMANG SERI SUTERISNAWATI, SH	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pejabat Struktural Gelombang I Tahun 2021 2. English Effective Presentation Bagi peserta PKP Gelombang I 3. Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon Sekretaris 4. Manajemen Aparatur Sipil Negara 5. Bimtek dan Sosialisasi SIKEP, SAPK, MySAPK, dan SITARA 6. E-Learning Calon PPSPM
	MADE ARIS BUDIARTHA, S.E., M.A.P.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator 2. Basic Booklet Design with Adobe Indesign 3. Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon Sekretaris 4. FGD Implementasi SAKTI 5. E-Learning Calon PPSPM 6. Evaluasi LAKIP Tahun 2020
	NI MADE ARI ARTINI, SH	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panmud Hukum
	KADEK HENDRA SAPUTRA, SE.SH.	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi E-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
	KADEK KRISNA SINTIA DEWI, SH.MH.	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan General English for Adult 2. Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti
	GEDE EKO PRAYUDI, A.Md. SH	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi E-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT
	I GUSTI AGUNG PANJI, SH	Jurusita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita / Jurusita Pengganti
	I KADEK WIDIANTARA. A.Md	Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Arsip Digital Pengadilan 2. Sosialisasi Mekanisme Survei Eksternal ZI
	NI NYOMAN BUDIASIH, S.T., M.T.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Image Editing with Adobe Photoshop 2. Basic 3D Mapping 3. Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator 4. Bimtek Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi E-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT 5. Penyusunan Target TPNBP 6. Sosialisasi Mekanisme Survei Eksternal ZI 7. Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Pengadilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar
	NI LUH PUTU SUTRIANI, SH	Penyusun laporan Keuangan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Persiapan Migrasi SAKTI
	NI MADE DIAH SAWITRI, SE	Bendahara Umum Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Learning Jabfung Pranata APBN 2. Diklat Bendahara
	RAHMA SEVIANA PRATAMI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS Tahun 2021 2. Massive Open Online Course (MOOC) Kegiatan Latsar CPNS 3. English Effective Presentation Bagi Peserta Latsar Gol III



NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
	YUNITA ANJARDINI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	1. Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi CPNS Tahun 2021 2. Latsar CPNS Gol II

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Semarang dalam tahun 2021 melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dua DIPA yaitu DIPA dari Eselon I Sekretariat Mahkamah Agung dengan kode 005.01.099816 dan DIPA dari Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan kode 005.03.099817.

1. Program Dukungan Manajemen

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang dengan kode satker 099816 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.158.746.000,- dan ada penambahan pagu sewa rumah dinas hakim sebesar Rp. 22.680.000,- dan penambahan anggaran pakaian dinas sebesar Rp. 21.455.000,- serta telah melakukan revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga jumlah Pagu DIPA menjadi Rp.5.202.881.000,- yang terdiri dari :

- Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 3.860.334.000,-
- Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan kantor Rp. 1.296.447.000, yang terdiri dari ;
 - a. Belanja Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Rp. 379.789.000, untuk langganan koran, keperluan sehari – hari perkantoran/ ATK, honorarium tenaga kontrak (pramubakti, satpam dan supir);

- b. Belanja Langganan Daya dan jasa meliputi langganan internet, web hosting, pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon, air dan belanja sewa rumah dinas hakim Rp. 361.876.000,-
- c. Belanja Pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan gedung dan halaman kantor, rumah dinas, jaringan telepon, listrik, internet serta pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 381.063.000,-,
- d. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor meliputi honor operasional satker, belanja pakaian kerja honorer dan pegawai Rp. 79.179.000,-
- e. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Rp. 3.972.000,-
- f. Rapat koordinasi internal Rp. 10.588.000,-
- g. Belanja perjalanan dinas untuk konsultasi ke tingkat banding dan perjalan dinas dalam kota Rp. 33.460.000,-
- h. Belanja Perjalanan Dinas untuk pembinaan/ rapat koordinasi ke tingkat banding sebesar Rp. 9.090.000,-
- i. Belanja perjalanan dinas untuk konsultasi Ke KPPN/ KPKNL/ Kanwil DjPb sebesar Rp. 22.050.000,-
- j. Belanja operasional penanggulangan covid-19 sebesar Rp. 15.380.000,-

- Belanja barang non operasional sebesar Rp. 8.600.000,- yang terdiri dari
 - a. penanggulangan covid-19 Rp. 4.640.000,-
 - b. Belanja Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Rp. 3.960.000,-

- Belanja modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (PC Kepaniteraan) sebesar Rp. 37.500.000,-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang dengan kode satker 099817 memperoleh anggaran sebesar Rp. 129.095.000,- pada tahun 2021, dan telah melakukan revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali dengan pagu tetap yang terdiri dari:

- Belanja untuk penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama Rp. 40.095.000,- terdiri dari:
 - Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 9.025.000,-
 - Penetapan hari sidang Rp. 5.600.000,-
 - Pemeriksaan di sidang Pengadilan Rp. 13.070.000,-
 - Minutasi/ upaya hukum Rp. 1.650.000,-
 - Pengiriman petikan/ salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa Rp. 4.200.000,-
 - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan Rp. 5.250.000,-
 - Penanganan Perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama Rp. 1.000.000,-
 - Penanganan perkara Kasasi, PK di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 300.000,-
- Belanja sidang di luar gedung pengadilan sebesar Rp. 65.000.000,- untuk belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota.
- Belanja Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum Rp. 24.000.000,-

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Nomor	Satker	MAP	Pendapatan	Total
1	Pengadilan Negeri Semarang (DIPA 005.01.099816)	425131	11.004.400,-	
2	Pengadilan Negeri Semarang (DIPA 005.03.099817)	425232	3.530.000,-	

Nomor	Satker	MAP	Pendapatan	Total
3	Pengadilan Negeri Semarang (DIPA 005.03.099817)	425233	10.230.000,-	
4	Pengadilan Negeri Semarang (DIPA 005.03.099817)	425239	17.913.000,-	
Total				42.677.400,-

4. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Semarang pada Tahun 2021

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran

No	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
I	DIPA. SP DIPA.005. 01.2.099816/202 1			
	Belanja Gaji	Rp. 3.860.334.000,-	Rp. 3.706.142.512,-	96,02
	Belanja Operasional	Rp. 1,296.447,000,-	Rp. 1,282,068,852,-	98,89
	Belanja Non Operasional	Rp. 8.600.000,-	Rp. 8.509.600,-	98,95
	Belanja Modal	Rp. 37,500,000,-	Rp. 37,500,000,-	100
I	DIPA. SP DIPA.005. 03.2.099817/202 1			
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat	Rp. 40.095.000,-	Rp. 40.049.500,-	99,89

No	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
	pertama dan banding yang tepat waktu			
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan	Rp. 65.000.000,-	Rp. 37.840.000,-	58,22
	Pos Bantuan Hukum	Rp. 24.000.000,-	Rp 24.000.000,-	100

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Semarang yang juga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola Barang Milik Negara melakukan beberapa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.

1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Semarang seperti yang tertuang dalam tabel

Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Gedung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Nomer	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Gedung		Baik
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	2	Baik
7	Ruang Sidang Anak	1	Baik
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik



Nomer	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
9	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
12	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Baik
13	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	Baik
14	Ruang PP	1	Baik
15	Ruang Jurusita	1	Baik
16	Ruang Rapat	1	Baik
17	Ruang Posbakum	1	Baik
18	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	Baik
19	Ruang Arsip Perkara	1	Baik
20	Ruang penyimpanan Register	1	Baik
21	Ruang Kesehatan dan Laktasi	1	Baik
22	Ruang Server	1	Baik
23	Pantry	1	Baik
24	Toilet	6	Baik
25	Ruang tahanan pria	1	Baik
26	Ruang tahanan wanita	1	Baik
27	Ruang Tunggu anak, Ruang Bapas, Ruang Jaksa	1	Baik
28	Ruang mediasi, R. kaukus dan R Aanmaning	1	Baik
29	Ruang Diversi, R. Teleconference, R Peksos	1	Baik
30	Ruang perpustakaan	1	Baik
31	Musholla	1	Baik
32	Tempat Ibadah Umat Hindu	1	Baik
33	Aula/ Ruang Tamu Terbuka	1	Baik
34	Area Ramah Anak	1	Baik
35	Ruang Tunggu sidang	1	Baik
36	Lobby/ PTSP	1	Baik

Nomer	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
II	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	42	Baik
2	Genset	1	Baik
3	Laptop	25	Baik
4	Infokus/Proyektor	2	Baik
5	PABX	12	Baik
6	AC	22	Baik
7	AC Window	1	Baik
8	Fax	1	Baik
9	TV	4	Baik
10	Server	4	Baik
11	Mesin Ketik	3	Baik
12	CCTV	4	Baik
13	Router	1	Baik
14	Scaner`	3	Baik
15	Printer	23	Baik
16	UPS	8	Baik
17	Telepon	1	Baik
18	Finger Print	2	Baik
19	Lambang Instansi	2	Baik
20	Palu sidang	4	Baik
21	Mimbar	1	Baik
22	Dispenser	1	Baik
23	Tiang Bendera	3	Baik
24	Lambang Garuda Pancasila	8	Baik
25	Stabilisator	5	Baik
26	Karaoke	1	Baik
27	Soud system	3	Baik
28	Loud Speker	4	Baik
29	Jam elektronik	7	Baik
30	Jam Mekanis	1	Baik

Nomer	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
31	Meja Telepon	12	Baik
32	Meja Komputer	11	Baik
33	Bangku Panjang Kayu	16	Baik
34	Sice	14	Baik
35	Komputer Jaringan Lainnya	2	Baik
36	Kursi kayu	77	Baik
37	Kursi Besi	177	Baik
38	Meja Kerja kayu	112	Baik
39	Hand metal detector	2	Baik
40	Peta	3	Baik
41	Papan nama	39	Baik
42	Tabung pemadam api	4	Baik
43	Buffet	5	Baik
44	Brankas	5	Baik
45	Filing Kabinet	8	Baik
46	Rak Kayu	17	Baik
47	Rak Besi	7	Baik
48	Lemari Kayu	32	Baik
49	Lemari besi	6	Baik
50	Akses Card	5	Baik
51	Layar Proyektor	1	Baik
52	Sound System	3	Baik
53	Tablet PC	7	Baik
54	Rak Server	1	Baik
55	Vertical Blind	32	Baik
56	Perkakas lainnya (portal parkir)	1	Baik

Tabel 4.4 Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
	Pengadilan Negeri Semarang					
I	Jenis kendaraan Roda 4					
1	Kijang inova	1	X			
2	Kijang Kapsul	1	X			
3	Kijang Inova	1	X			Pinjam Pakai dari Pemda Kab Klungkung
4	Kijang Kapsul	1	X			Pinjam Pakai dari PN Denpasar
II	Jenis kendaraan Roda 2					
	Honda Supra 125	7	X			
	Honda Supra 100	2	X			
	Honda Vario 100	1	X			
	Honda Grand 100	1			X	

Tabel 4.3 Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Rumah dinas ketua	1	X			
2	Rumah dinas wakil	1	X			
3	Rumah dinas hakim	5	X			

a) Pengadaan.

Adapun Pengadaan barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan dalam Tahun 2021 disajikan dalam tabel.

Tabel 4.5 Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi Pendukung SIPP

No.	Nama	PAGU
1	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi (PC Kepaniteraan)	Rp. 37.500.000,-

b) Pemeliharaan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan dalam tahun 2021 disajikan dalam tabel.

Tabel 4.6 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Gedung Pada Pengadilan Negeri Semarang Dalam Tahun 2021.

NO.	NAMA	PAGU	REALISASI	Persentase (%)
1	Pemeliharaan Gedung Bertingkat	Rp. 161.600.000,-	Rp. 161.594.500,-	100
2	Pemeliharaan gedung zetting plaats	Rp. 8.000.000,-	Rp. 7.992.000,-	99,90
3	Pemeliharaan Halaman gedung	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	100
4.	Pemeliharaan Rumah Dinas	Rp. 41.400.000,-	Rp. 41.392.000	99,98

Tabel 4.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pada Pengadilan Negeri Semarang Dalam Tahun 2021

NO.	N A M A	P A G U	REALISASI	Persentase (%)
1	Pemeliharaan Genzet	Rp. 1.580.000,-	Rp. 1.575.131,-	99,69
2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pinjam Pakai Pemda Klungkung	Rp. 30.200.000,-	Rp. 30.196.704,-	99,99
3	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Rp. 7.050.000,-	Rp. 7.050.000,-	100
4.	Pemeliharaan Roda 4	Rp. 65.145.000,-	Rp. 65.141.906,-	100
5.	Pemeliharaan Roda 2	Rp. 24.600.000,-	Rp. 24.595.187,-	99,98
6.	Pemeliharaan Printer	Rp. 7.600.000,-	Rp. 7.600.000,-	100
7.	Pemeliharaan PC/Notebook	Rp. 17.200.000,-	Rp. 17.199.588,-	100
8.	Pemeliharaan CCTV	Rp. 2.688.000,-	Rp. 2.688.000,-	100
9.	Pemeliharaan ac split	Rp. 10.000.000	Rp.10.000.000,-	100

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan e-court telah memberikan dampak langsung bagi praktik Advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (*advokat*). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem e-court sehingga

keberadaannya diakui secara formil. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun e-court akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi :

Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, sistem e-court juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Semarang sudah sampai pendaftaran perkara melalui user pengguna lain, selama tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 232 Perkara yang terdiri dari 128 perkara gugatan dari 104 Perkara Permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang. Secara keseluruhan sudah 126 Perkara yang sudah mendapatkan nomer perkara dari penggunaan *e-Court*.

Pengadilan Negeri Semarang sudah menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan *e-Court* seperti adanya pojok *e-Court* diaman bertujuan untuk membantu pendaftaran user *e-Court*, dan menyediakan



Scanner untuk Pelaksanaan *e-Summons* dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) untuk memudahkan pembayaran sehingga tidak perlu lagi keluar dari kantor Pengadilan negeri Semarang

2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Negeri Semarang sudah berjalan dengan baik, dimana Pengadilan Negeri Semarang terus berada di peringkat teratas dalam aplikasi monitoring Implementasi SIPP. Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah menggunakan SIPP

4.1.1. Pelaksanaan SIPP sudah di dukung dengan fasilitas layanan internet sebesar 100Mbps dan didukung jaringan internet menggunakan Lan dan Wireless.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI MENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Semarang terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimanapelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Semarang dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Semarang sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan

Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 20121 mendapatkan nilai A Excellent sesuai dengan Sertifikat akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor: TAPM.234/QMR/SERTIFIKAT/3/2021. Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali Asesmen Oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dengan tujuan dimana pelayanan akan dilaksanakan di meja pelayanan yang disediakan di lobby Pengadilan Negeri Semarang. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Semarang telah mendapatkan juara II untuk Pengadilan Negeri Kelas II sesuai dengan Piagam Penghargaan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18/PIAGAM PTSP/PN/2018

Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) meja pelayanan, yaitu :

1. Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang hukum seperti pendaftaran CV, melayani pengaduan dari masyarakat baik dari para pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun dari customer focus dll.;
2. Meja pelayanan Kepaniteraan Perdata dan Meja Kasir : melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata dan;

3. Meja pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana;
4. Meja pelayanan Tata Usaha dan Keuangan : melayani penerimaan surat masuk, penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, dan lain-lain;
5. Pojok e-Court : mempunyai kewenangan untuk menerima pendaftaran user e-Court untuk pengguna lain.
6. Meja Help Desk : melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan pendaftaran antran siding para pengguna pengadilan yang akan melakukan persidangan.

Pengadilan Negeri Semarang telah meningkatkan pelayanan di PTSP dengan menyediakan sarana penunjang untuk para pencari keadilan dengan kebutuhan khusus seperti guiding block, ramp disabilitas, dan petunjuk yang menggunakan huruf *braille*

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Semarang telah memiliki beberapa Inovasi yang lebih mengedepankan Teknologi Informasi, dengan maksud memudahkan Pengguna Pengadilan maupun seluruh karyawan Pengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan pelayanan.

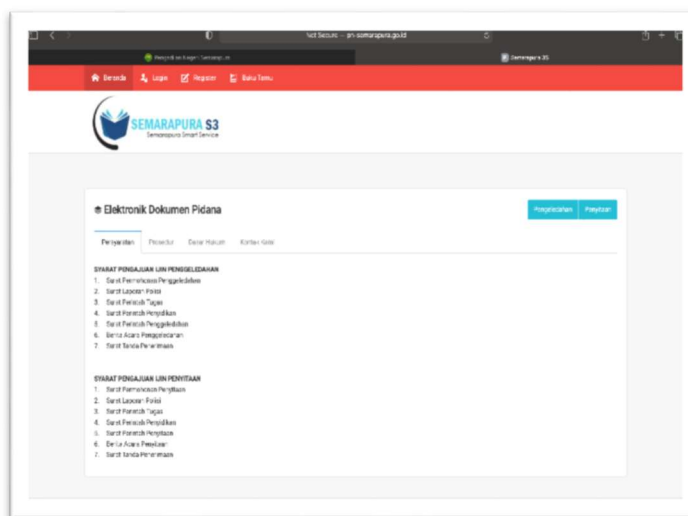
Adapun Inovasi yang di miliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, antara lain :

1. Aplikasi Semarang smart service “3s”
2. Aplikasi sipepi (sistem pengelolaan perangkat teknologi

informasi)

3. Aplikasi asikk (aplikasi izin keluar kantor)
4. Anjungan layanan mandiri
5. Co-working space
6. Panggilan sidang
7. Mesin antrean PTSP

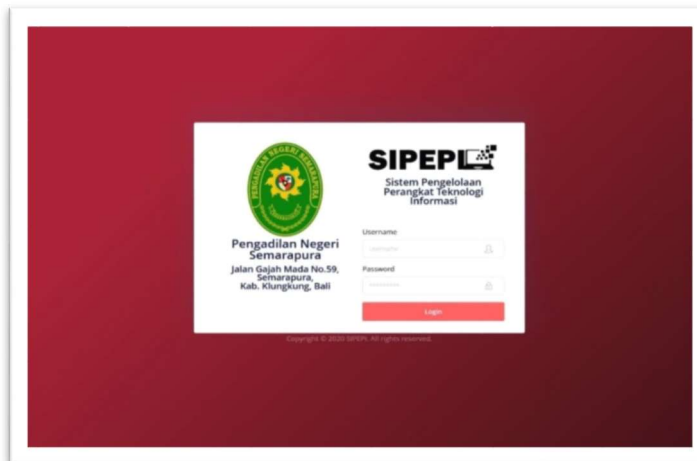
1. Semarang Smart Service “S3”



Aplikasi pengelolaan perangkat teknologi informasi semua perangkat teknologi yang berada dimasing-masing ruangan pada Pengadilan Negeri Semarang tercatat pada Aplikasi SIPEPI, yang nantinya jika salah satu dari perangkat

tersebut mengalami gangguan, maka Staf atau Pegawai hanya perlu menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan kendala pada perangkat yang mengalami gangguan tersebut dan nantinya akan ditindak lanjuti oleh Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).

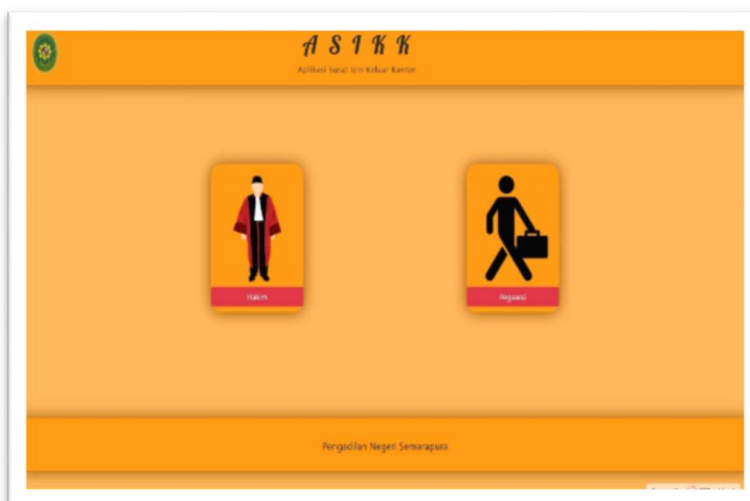
2. SIPEPI



Aplikasi pengelolaan perangkat teknologi informasi semua perangkat teknologi yang berada dimasing-masing ruangan pada Pengadilan Negeri Semarang tercatat pada Aplikasi SIPEPI,

yang nantinya jika salah satu dari perangkat tersebut mengalami gangguan, maka Staf atau Pegawai hanya perlu menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan kendala pada perangkat yang mengalami gangguan tersebut dan nantinya akan ditindak lanjuti oleh Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).

3. ASIKK



Aplikasi Surat Izin Keluar Kantor pada Pengadilan Negeri Semarang Sebelum adanya Aplikasi ASIKK, seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Semarang menggunakan Surat

Izin Keluar secara Manual dengan mengambil Form di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, namun dengan telah adanya Aplikasi ASIKK Pegawai yang akan keluar kantor hanya perlu membuka Aplikasi ASIKK dari perangkat komputer diruangan setiap Pegawai.

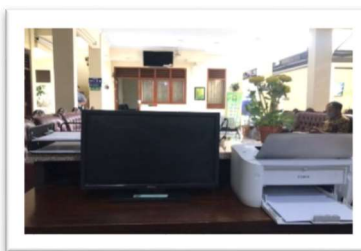
4. Anjungan Layanan Mandiri



Pelayanan berupa komputer dari Pengadilan Negeri Semarang yang berada di depan meja Lobby, untuk dapat memudahkan Pengguna Pengadilan. Disana Para

Pengguna Pengadilan yang kurang memahami mengenai pengajuan Pelayanan Pengadilan dapat menggunakan komputer tersebut dengan didampingi oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Semarang ataupun jika Pengguna Pengadilan yang tidak memiliki perangkat Komputer dirumahnya pun dapat menggunakan layanan tersebut..

5. Co-Working Space



Pelayanan yang diberikan berupa perangkat Komputer, Printer dan kertas kepada

Pengguna Pengadilan di Pengadilan Negeri Semarang untuk memudahkan jalannya persidangan.

6. Panggilan Sidang



Layanan yang diberikan kepada pihak yang akan melakukan persidangan, jadi para pihak bias langsung tahu ruang sidang yang akan di gunakan. Ketika para pihak sudah siap bias dilakukan panggilan sidang

7. Mesin Antran Ptsp



Layanan yang diberikan kepada pihak yang akan ingin mendapatkan layanan PTSP agar terjadi antrian yang tertib

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pegawai Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, apapun jabatannya tetap akan mendapatkan pengawasan/kontrol dari atasannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan kinerja para pegawai di Pengadilan Negeri Semarang maka telah melakukan sistem pengawasan secara berjenjang seperti misalnya para staf akan diawasi oleh Kepala Urusannya atau Panitera Muda, kemudian Panitera dan Sekretaris melakukan pengawasan terhadap bawahannya termasuk staf, kemudian Ketua dan Wakil Ketua akan mengawasi kinerja para Hakim, pejabat bawahan yang lain, termasuk seluruh staf karyawan dan karyawan. Sedangkan Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan terhadap masing-masing urusan baik kepaniteraan maupun administrasi umum, dibawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang selaku Koordinator Pengawasan. Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Semarang Dalam Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomer : W24-U3/1185/KP.01.2/7/2021

Tabel 13 Daftar Hakim Pengawas Bidang

Nomer	Nama Hakim	Bagian
1	Pulung Yustisia Dewi, SH.,MH.	Pengawas Bagian Umum dan Keuangan
2	Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, SH.,M.Hum	Pengawas Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Nomer	Nama Hakim	Bagian
3	Dwi Asri Mukaromah, S,H	Pengawas Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4	Hanifa Feri Kurnia, SH	Pengawas Administrasi Perisdangan dan SIPP, dan Pengawas Bagian Hukum
5	Kadek Dwi Krisna Ananda, SH.	Pengawas Bagian Pidana, dan Pengawasan dan Pengamatan
6	Valeria Flossie Avilia Santi, SH	Pengawas Kinerja Pelayanan Publik
7	Jelika Pratiwi, SH	Pengawas Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Di samping pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang, Pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Semarang dalam selama tahun 2021 juga meliputi pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengawasan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Urusan Administrasi.

B. EVALUASI

Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2021 telah melakukan pengawasan, baik yang berkaitan dengan tugas-tugas Administrasi teknis maupun tugas-tugas Administrasi Kesekretariatan. Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Semarang, selain dilaksanakan oleh tim Pengawas dari Pengadilan Negeri Semarang, juga dilaksanakan oleh tim pengawas dari Pengadilan Tinggi Denpasar yang dilaksanakan secara periodik pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali.

Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Semarang setiap bulan diadakan rapat bulanan yang mengikut sertakan seluruh pejabat struktural maupun pejabat teknis dan seluruh karyawan di

lingkungan Pengadilan Negeri Semarang. Dalam rapat bulanan tersebut dilakukan evaluasi hasil pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditangani oleh Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Untuk hasil dan evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan maka seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas-tugasnya dapat di kontrol sudah sejauh mana tugas yang dilaksanakan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapinya untuk dapat menghasilkan hasil tugas yang optimal.

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam hal pelaksanaan pengawasan telah mengacu kepada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan tersebut diatas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk memberi pelayanan yang maksimal Pengadilan Negeri Semarang guna mendukung program Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara untuk mempertahankan raihan prestasi selama ini secara berkesinambungan di bidang tata kelola aset dan anggaran selama ini seperti Opini Laporan Keuangan dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut – turut sejak tahun 2012 – 2016, selain itu Mahkamah Agung senantiasa masuk 4 besar dalam realisasi anggaran maka penambahan Sumber Daya Manusia khususnya bidang non teknis (kesekretariatan) merupakan suatu keharusan melihat kondisi dan komposisi tenaga kesekretariatan peradilan saat ini.
- b. Pada bidang teknis dipandang perlu untuk memberikan perimbangan antara jumlah perkara dengan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Dibidang sarana dan prasarana hendaknya diadakan penambahan rumah dinas Hakim dan biaya pemeliharaan rumah dinas hakim. Disamping itu, hendaknya perlu dibangun gedung Pengadilan Negeri Semarang karena Gedung yang ada sekarang sudah berdiri sejak tahun 1979

B. REKOMENDASI

Pengadilan Negeri Semarang sangat kekurangan Tenaga Petugas Administrasi baik di sekretariat maupun di penaiteraan banyak di rangkap oleh tenaga panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dimana staf yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 4 (Empat) orang, sehingga dapat menghambat Pengisian Register perkara baik pidana maupun perdata, untuk itu kami mohon dapat ditambah Tenaga Staf Administrasi Non Teknis untuk pengisian register perkara perdata maupun pidana serta menguasai. Untuk di bagian Kesekretaritan juga terdapat tenaga Tenis seperti juru sita dan juru sita pengganti yang di perbantukan di bagian Umum dan Keuangan, dan bagian Kepegawaian.